



RENCANA KERJA TAHUN 2022



**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN SIAK
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategik (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak Tahun 2022.

Demikian Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak yang dapat kami persembahkan, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu Wata,ala semoga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Siak Sri Indrapura, September 2021

**Plt. KEPALA KANTOR KESBANG
DAN POLITIK KABUPATEN SIAK**



**H. ZULFIKRI, S.Sos, MM
NIP. 19690705 199002 1 002**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Daftar Tabel	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	4
1.3	Maksud dan Tujuan	6
1.4	Sistematika Penulisan	7
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KESBANGPOL TAHUN LALU	8
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	8
2.2	Analisis Kinerja Kegiatan	10
2.3	Pengukuran Pencapaian sasaran	13
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	15
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	20
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	23
3.1	Telahaan terhadap Kebijakan Daerah	23
3.2	Tujuan dan Sasaran	23
3.3	Indikator Kinerja Utama	24
3.4	Rencana Kinerja Tahunan	25
BAB IV	PENUTUP	28
4.1	Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	28
4.2	Kaidah-kaidah Pelaksanaan	28
4.3	Rencana Tindak Lanjut	29

DAFTAR TABEL

BAB II

II.1	Rencana dan Realisasi Indikator Input Anggaran Tahun 2020	8
II.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	10
II.3	Rencana dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	11
II.4	Pengukuran Capaian Sasaran Tahun 2021	14
II.5	Review Rencana Awal Tahun 2021	15
II.6	Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2022	20

BAB III

III.1	Identifikasi Kebijakan Daerah	23
III.2	Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	24
III.3	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (RKT-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk priode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022;
3. Renja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah, sesuai pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD sesuai dengan tata cara dan penyusunannya tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

Visi Kabupaten Siak adalah

"Terwujudnya Kabupaten Siak yang Amanah, Sejahtera, dan Lestari dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis dan Budaya Melayu."

Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Siak dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah Melalui Penerapan E-government.
2. Mewujudkan Kualitas Sdm Yang Agamis, Unggul, Sehat Dan Cerdas.
3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Yang Inklusif.
4. Mewujudkan Perekonomian Yang Maju Dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Sektor Pertanian, Industri, Umkm, Ekonomi Kreatif, Pariwisata Dan Sektor Produktif Lainnya.
5. Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Pemajuan Budaya Melayu.

Sejalan dengan Misi dan Program Kepala Daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah misi ke satu dan dua yaitu “ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah Melalui Penerapan E-government” dan “ Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, unggul, sehat dan cerdas ” dengan pokok-pokok program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;

Visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak adalah

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Siak yang bersatu, harmonis, demokratis, partisipatif dan terciptanya suasana yang aman dan nyaman dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya melayu”.

- Misi :
1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat;
 2. Mewujudkan masyarakat yang demokratis dan partisipatif;
 3. Mewujudkan situasi ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak Tahun 2022 dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 7);
 17. Peraturan Bupati Siak Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 31).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2020, perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak tahun 2022

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja kedalam Kebijakan

Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun rumusan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak Tahun 2022 disusun secara sistematis ke dalam naskah Renja kesbangpol Kabupaten Siak Tahun 2022, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KESBANG TAHUN LALU

BAB III TAHAPAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak tahun 2020 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel II.1

RENCANA DAN REALISASI INDIKATOR INPUT (ANGGARAN) KEGIATAN KANTOR KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN SIAK TAHUN 2020

No	Urusan, Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran Tahun 2020 (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.989.000	2.850.000	95,35
2	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	41.400.000	25.682.108	62,03
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	56.184.576	53.550.042	95,31
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	34.766.276	34.479.902	99,18
5	Penyediaan alat tulis kantor	91.792.000	91.510.200	99,69
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	56.015.600	56.015.600	100,00
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.160.000	3.160.000	100,00
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.240.000	6.240.000	100,00
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	221.960.000	145.422.224	65,52
10	Penyediaan jasa keamanan kantor	42.984.576	42.741.402	99,43

No	Urusan, Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran Tahun 2020 (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
11	Penyediaan jasa administrasi kantor	170.738.304	149.594.907	87,62
12	Kunjungan kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah	69.980.000	31.679.000	45,27
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
1	Pengadaan computer, printer dan kelengkapannya	41.400.000	41.175.000	99,46
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	80.200.000	75.617.735	94,29
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	6.600.000	8.600.000	100,00
Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				
1	Penyiapan tenaga pengendali keamanan kenyamanan lingkungkungan	73.300.000	57.890.000	78,98
2	Operasional komunitas intelijen daerah	50.105.000	28.735.000	57,35
3	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	15.150.000	0	0
Program Pengembangan wawasan kebangsaan				
1	Upacara Hari Bela Negara	26.000.000	3.420.000	13,15
2	Sosialisasi Nilai Kebangsaan	52.600.000	0	0
3	Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	22.260.000	17.662.500	79,35
4	Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	17.770.000	0	0
Program Pendidikan Politik Masyarakat				
1	Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik	5.100.000	3.845.000	75,39
2	Sosialisasi Peraturan Peraturan Perundang-Undangan Politik Kepada Masyarakat	95.000.000	63.675.000	67,03
JUMLAH		2.750.754.520	2.312.140.058	84,05

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

2.2 Analisis Kinerja Kegiatan

Pengukuran kinerja kegiatan adalah pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja masing-masing kegiatan yang terdiri dari input, output, dan outcome, serta telah sampai sejauh mana tingkat capaian dari rencana yang telah ditetapkan dan realisasi capaian indikator kinerja input telah diuraikan sebagaimana diatas.

Sedangkan untuk realisasi capaian indikator kinerja dari output dan outcome yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak Tahun 2020 diantaranya sebagai berikut :

TABEL II.2
PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kepuasan Masyarakat	A (Sangat Baik)
		Nilai SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	BB
2.	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Konflik Sosial	6
3.	Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan	Jumlah Konflik Sara	0
4.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Menggunakan Hak Politik Dalam Pembangunan Daerah	78%

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

TABEL II.3
RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME
KEGIATAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIAK TAHUN 2020

No	Program dan Kegiatan	Tolak Ukur	Target Kinerja		%
			Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	
2	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	
5	Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	
10	Penyediaan jasa keamanan kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	
11	Penyediaan jasa administrasi kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	

No	Program dan Kegiatan	Tolak Ukur	Target Kinerja		%
			Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
12	Kunjungan kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
1	Pengadaan Komputer, Printer dan Kelengkapannya	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	3 Bulan	3 Bulan	
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	
	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				
1	Penyiapan tenaga pengendali keamanan kenyamanan lingkungan	Jumlah konflik sosial	5 Orang	5 Orang	
2	Operasional komunitas intelijen daerah	Jumlah konflik sosial	25 Orang	25 Orang	
3	Tim terpadu penanganan konflik sosial	Jumlah konflik sosial	45 Orang	45 Orang	
	Program Pengembangan wawasan kebangsaan				
1	Upacara Hari Bela Negara	Jumlah Konflik yang Bernuansa Sara	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
2	Sosialisasi Nilai Kebangsaan	Jumlah Konflik yang Bernuansa Sara	45 Orang	45 Orang	
3	Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah Konflik yang Bernuansa Sara	49 Orang	49 Orang	
4	Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Jumlah Konflik yang Bernuansa Sara	30 Orang	30 Orang	

No	Program dan Kegiatan	Tolak Ukur	Target Kinerja		%
			Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
	Program Pendidikan Politik Masyarakat				
2	Penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik kab. siak	Persentase Partisipasi Masyarakat yang menggunakan hak politik dalam pembangunan daerah	30 Orang	30 Orang	
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan politik kepada masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat yang menggunakan hak politik dalam pembangunan daerah	3982 Orang	3982 Orang	

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

2.3. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pengukuran pencapaian sasaran dimaksud adalah pengukuran kinerja kegiatan pada tingkat capaian program tahunan dari sasaran program yang ditetapkan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak.

TABEL II.4
PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIAK TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISAS I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	A
			Nilai SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	BB	BB
2.	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Konflik Sosial	6	0
3.	Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan	Program Peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah Konflik Sara	0	0
4.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Politik	Program Pendidikan Politik	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada	78%	

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD 2021 dengan rancangan awal usulan OPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak sesuai tabel berikut :

**TABEL II.5
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIAK TAHUN 2021**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana perangkat daerah		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang	1.579.001.735
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Jenis	2.105.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	44 Jenis	107.496.967
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Jenis	35.058.200

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Jenis	6.484.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235 Laporan	404.984.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemenuhan jasa Penunjang urusan Pemerintahan		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Jenis	3.150.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Jenis	53.200.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Orang	310.872.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	50.940.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	50.440.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Jenis	7.140.000

	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Parisipasi Masyarakat Yang Menggunakan Hak Politik Dalam Pembangunan Daerah		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, tika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah peserta dan dokumen laporan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40 Orang	108.620.000
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	45 Orang	1.199.127.270

		Politik di Daerah		
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas/LSM yang mendapat pembinaan dan pengawasan		
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	15 Orang	86.557.800
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen dan laporan pelaksanaan Kebijakan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya		
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	197.127.700
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik		

		Sosial		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase ketersediaan dokumen pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Kegiatan	203.584.000
	JUMLAH			4.405.889.172

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**TABEL II.6
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIAK TAHUN 2022**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)			Keterangan
						Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Pagu Indikatif (Rp.)	Sesudah	Selisih	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2.681.905.735	0			
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1.608.501.735	0			
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang	13 Orang				1.608.501.735				
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							558.053.800	0			
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	3 Jenis				Kab. Siak, Siak Semua Kelurahan	2.100.900			
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor, Alat Kebersihan dan Makan dan Minum yang Disediakan	44 Jenis	44 Jenis				Kab. Siak, Siak Semua Kelurahan	109.062.200			
8	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis	7 Jenis				Kab. Siak, Siak Semua Kelurahan	37.457.700			
8	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dan Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	4 Jenis	4 Jenis				Kab. Siak, Siak Semua Kelurahan	7.680.000			
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah	221 Laporan	221 Laporan				Kab. Siak, Siak Semua Kelurahan	401.753.000			
8	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							379.020.200	0			
8	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis dan Jumlah Perangko, Materai dan Perangko Surat	1 Jenis	1 Jenis				Kab. Siak, Siak Semua Kelurahan	5.773.200			

8	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	3 Jenis	3 Jenis				Kab. Siak, Siak Semua Kelurahan	60.600.000			
8	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Jasa Administrasi Keuangan, Kebersihan, Keamanan dan Administrasi Kantor	14 Orang	14 Orang				Kab. Siak, Siak Semua Kelurahan	312.647.000			
8	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								136.330.000	0		
8	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan yang di Pelihara Secara Rutin/Berkala	1 Unit	1 Unit				Kab. Siak, Siak Semua Kelurahan	52.420.000			
8	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di Pelihara Secara Rutin/Berkala	2 Unit	2 Unit				Kab. Siak, Siak Semua Kelurahan	67.920.000			
8	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	4 Unit	4 Unit				Kab. Siak, Siak Semua Kelurahan	15.990.000			
8	01	02			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								350.000.000	0		
8	01	02	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								350.000.000	0		
8	01	02	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersedianya Anggaran Operasional FPK Kabupaten Siak	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Siak, Siak Semua Kelurahan	350.000.000			
8	01	03			PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik								1.209.587.170	0		
8	01	03	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan								1.209.587.170	0		

					Situasi Politik														
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Rapat Bantuan Keuangan Partai Politik	45 Orang	45 Orang							Kab. Siak, Siak Semua Kelurahan	1.209.587.170			
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA											401.198.200	0		
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kabupaten/Kota											401.198.200	0		
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Monitoring P4GN dan Tersedianya Anggaran Operasional FKUB Kabupaten Siak	14 Kecamatan	14 Kecamatan							Kab. Siak, Siak Semua Kelurahan	401.198.200			
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL											113.129.100	0		
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial											113.129.100	0		
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Puskomin	12 Laporan	12 Laporan							Kab. Siak, Siak Semua Kelurahan	113.129.100			
TOTAL																4.755.820.205	0		

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah

Tabel III.1
IDENTIFIKASI KEBIJAKAN DAERAH
KABUPATEN SIAK

Nilai SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	BB
Jumlah Konflik Bernuansa Sara	0

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak telah melaksanakan telaahan kebijakan daerah yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direncanakan.

3.2 Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

1. Meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat;
2. Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat;
3. Mewujudkan Kesadaran berbangsa dan Bernegara;
4. Meminimalisir Potensi Konflik;
5. Meningkatkan Kapasitas Sumber Aparatur.

B. Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Politik Masyarakat;
2. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu;
3. Terwujudnya Kesadaran Berbangsa dan Bernegara;
4. Tersedianya Informasi Potensi Konflik;

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur.

3.3 Indikator Kinerja Utama

Tabel III.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	ALASAN / SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala	Hasil Survey
		Nilai Predikat SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah OPD oleh Inspektorat
2.	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah konflik Sosial	Konflik	Hasil Pendataan
3.	Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan	Jumlah Konflik Bernuansa Sara	Konflik	Hasil Pendataan
4.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Menggunakan Hak Politik Dalam Pembangunan Daerah	%	Jumlah Masyarakat Yang Menggunakan Hak Politik dibagi Jumlah Seluruh Masyarakat yang Memiliki Hak Politik x 100%

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

3.4 Rencana Kinerja Tahunan 2022

Tabel III.3
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2022
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIAK

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana perangkat daerah	2.515.633.935	
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan perangkat daerah	1.608.501.735	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1.608.501.735	
B	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	391.782.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.100.900	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor, Alat Kebersihan dan Makan dan Minum yang Disediakan	76.343.500	
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	26.199.600	
4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dan Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	7.680.000	
5	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah	279.458.000	
C	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemenuhan jasa Penunjang urusan Pemerintahan	379.020.200	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis dan Jumlah Perangko, Materai dan Perangko Surat	5.773.200	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	60.600.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Jasa Administrasi Keuangan, Kebersihan, Keamanan dan Administrasi Kantor	312.647.000	
D	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.330.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan yang di Pelihara Secara Rutin/Berkala	52.420.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di Pelihara Secara Rutin/Berkala	67.920.000	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	15.990.000	

II.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang wawasan kebangsaannya meningkat	404.702.000	
A	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	404.702.000	
1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersedianya Anggaran Operasional FPK Kabupaten Siak	404.702.000	
III.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Parisipasi Masyarakat Yang Menggunakan Hak Politik Dalam Pembangunan Daerah	2.337.839.000	
A	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah peserta dan dokumen laporan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.337.839.000	
1	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Rapat Bantuan Keuangan Partai Politik	2.337.839.000	
IV.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	401.198.200	
A	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen dan laporan pelaksanaan Kebijakan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	401.198.200	
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Monitoring P4GN dan Tersedianya Anggaran Operasional FKUB Kabupaten Siak	401.198.200	
V.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	113.129.100	
A	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase ketersediaan dokumen pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	113.129.100	

		Sosial		
1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Puskomin	113.129.100	
			5.772.502.235	

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Kesbangpol Kabupaten Siak Tahun 2022 sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Siak Tahun 2022. serta pedoman Kesbangpol dalam melaksanakan tugas yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 yang didalamnya tercantum indikator kinerja *output* dari kegiatan dan *outcome* dari program serta target yang hendak dicapai sesuai sumber daya yang ada di Kesbangpol baik sumber daya aparatur (pegawai), sarana dan prasarana aparatur yang menjadi aset Kesbangpol serta anggaran yang tersedia, hendaknya dapat dilaksanakan secara akuntabel, konsisten, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan didalam Renja Kesbangpol tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional, dan untuk mencapai sasaran-sasaran program dan kegiatan pembangunann tahun 2022.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Kesbangpol Tahun 2022 dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi;
2. Rencana Kerja Kesbangpol Tahun 2022 ini merupakan pedoman bagi unit kerja dilingkungan Kesbangpol Kabupaten Siak dalam menyusun rencana program dan kegiatan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Rencana Kerja Kesbangpol Tahun 2022 ini akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap kegiatan;
4. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Kerja ini sangat ditentukan oleh penguatan peran serta aktif seluruh aparatur Kesbangpol Kabupaten Siak;
5. Dokumen Rencana Kerja ini merupakan dasar dan tolak ukur untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan di Kesbangpol Kabupaten Siak.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kesbangpol Kabupaten Siak tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur Kesbangpol untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks, upaya yang ditempuh dengan pendidikan formal, Bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur;
2. Aparatur Kesbangpol yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang;
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja;
4. Dalam rangka sinergitas Kesbangpol harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud;

6. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin pelaksanaan program/kegiatan secara optimal dan terukur untuk dapat dievaluasi terkait pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa yang akan datang oleh pejabat dan seluruh staf Kesbangpol Kabupaten Siak sehingga diharapkan kinerja Kesbangpol Kabupaten Siak dapat lebih baik lagi di tahun selanjutnya.

Siak Sri Indrapura, September 2021

**Plt. KEPALA KANTOR KESBANG
DAN POLITIK KABUPATEN SIAK**



**H. ZULFIKRI, S.Sos, MM
NIP. 19690705 199002 1 002**